



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Diharapkan penyusunan LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Malili, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan


dr. Adnan Kasim

NIP. 19660609 199303 2 004

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Diharapkan penyusunan LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Malili, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Adnan Kasim
NIP. 19660609 199303 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 yang tertuang pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat

Dengan indikator:

- Angka Kematian Ibu (AKI),
Capaian kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 73,44%
- Angka Kematian Bayi (AKB),
Capaian kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 54,88%
- Prevalensi Stunting, dan
Capaian kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 112,25%
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan
Capaian kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 98,82%

2. Sasaran Kedua: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 100,11% (Nilai SAKIP pada tahun 2024 belum ada, karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, jadi untuk sementara menggunakan nilai SAKIP tahun 2023)

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan ataupun peluang solusi yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sinergisme dan sistem rujukan yang optimal antara FKTP (Puskesmas) dan FKTRL (Rumah Sakit) termasuk penguatan Puskesmas PONED dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
- Meningkatkan gizi balita dan penanggulangan stunting dengan Lima Pilar penanggulangan yaitu komitmen pimpinan tinggi, kampanye dan strategi komunikasi, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, penguatan monev.
- Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif melalui pembudayaan Germas, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan aksi Multi Sektoral
- Kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
D. Keadaan Pegawai.....	5
E. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
F. Isu-Isu Strategis.....	8
G. Keuangan.....	9
H. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
B. Rencana Kerja Tahun 2024.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	33
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	59
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	64
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Rencana Tindak Lanjut.....	67

DAFTAR TABEL



Tabel 1 1 Distribusi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan	5
Tabel 1 2 Distribusi Pegawai menurut Jabatan Struktural	5
Tabel 1 3 Distribusi Pegawai menurut Jabatan Fungsional	6
Tabel 1 4 Kelengkapan Sarana Prasarana Puskesmas	8
Tabel 1 5 Anggaran Berdasarkan Sumber Anggaran	9
Tabel 1 6 Ringkasan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	9
Tabel 2 1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	15
Tabel 2 2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Tahunan	17
Tabel 2 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2 4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	18
Tabel 2 5 Perjanjian Kinerja	23
Tabel 2 6 Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 2 7 Anggaran Belanja Dinas Kesehatan	24
Tabel 2 8 Target Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	25
Tabel 2 9 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Kesehatan.....	29
Tabel 3 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 3 3 Capaian Kinerja Program.....	32
Tabel 3 4 Rumusan dan Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis	33
Tabel 3 5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran	34
Tabel 3 6 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	34
Tabel 3 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	37
Tabel 3 8 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab Kematian.....	41
Tabel 3 9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	41
Tabel 3 10 Jumlah Balita Stunting Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas	44
Tabel 3 11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	45
Tabel 3 12 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan.....	47

Tabel 3 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan	48
Tabel 3 14 Nilai Angka, Kategori dan Interpretasi AKIP	50
Tabel 3 15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan	51
Tabel 3 16 Rumusan dan Formulasi Indikator Standar Pelayanan Minimal	52
Tabel 3 17 Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal	54
Tabel 3 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	55
Tabel 3 19 Rekap Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2024	59
Tabel 3 20 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	64
Tabel 3 21 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP	64

DAFTAR GRAFIK



Grafik 3 1 Grafik Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu.....	36
Grafik 3 2 Grafik Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi	40
Grafik 3 3 Grafik Target dan Realisasi Prevalensi Stunting	43
Grafik 3 4 Grafik Target dan Realisasi IKM Urusan Kesehatan	48
Grafik 3 5 Grafik Target dan Realisasi Nilai LAKIP	51

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan program kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan, mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kepercayaan

kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan
 - a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 - b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan organisasi

Susunan organisasi pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Tugas dan Fungsi

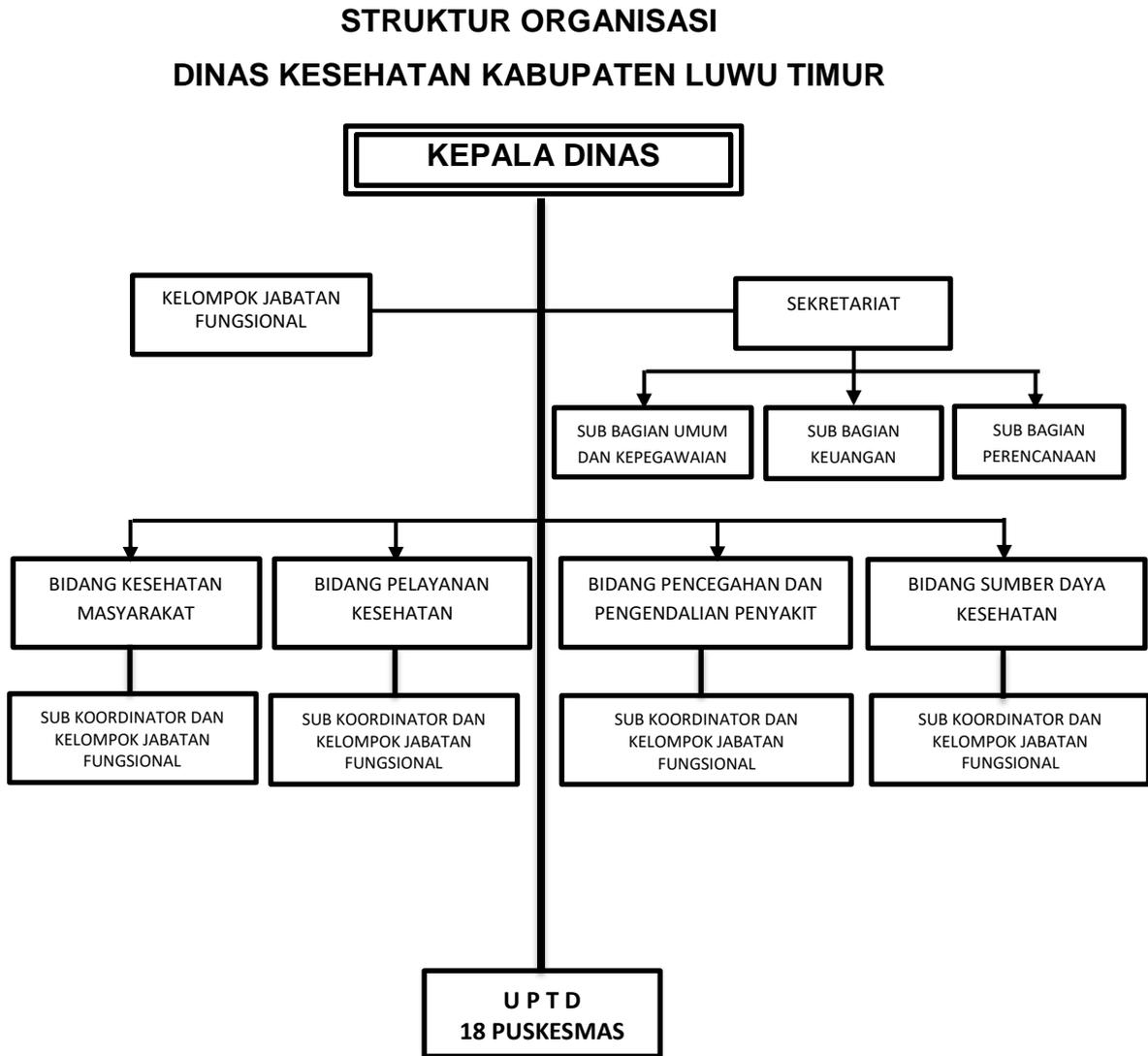
Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sumber daya kesehatan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Stuktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



D. Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya manusia tahun 2024 sebanyak 2.076 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 275 orang dan perempuan sebanyak 1.801 orang yang tersebar pada Dinas Kesehatan dan 18 UPTD Puskesmas. Distribusi pegawai menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan sebagai berikut:

Tabel 1 1 Distribusi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan													
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV	5	19	24	151	0	0	0	0	0	0	0	0	29	170
2	III	2	12	50	361	17	92	4	1	0	0	0	0	73	466
3	II	0	0	0	4	16	52	0	2	1	1	0	0	17	59
4	PPPK VII	0	0	0	0	17	164	0	0	0	0	0	0	17	164
5	PPPK IX	0	0	6	53	0	1	0	0	0	0	0	0	6	54
6	PPPK X	0	0	7	36	1	6	0	0	0	0	0	0	8	42
7	Upah Jasa	2	0	21	219	17	378	68	39	6	7	2	24	116	667
8	Sukarela	0	0	7	77	2	95	0	4	0	0	0	0	9	176
9	Nusantara sehat	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	9	31	115	904	70	788	72	46	7	8	2	24	275	1801

Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Lutim 2024

Selain menurut kualifikasi pendidikan, pembagian pegawai pada Dinas Kesehatan juga dibagi menurut pangkat/ golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 2 Distribusi Pegawai menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	S3/S2		S1/DIV		D1-D3		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	II a							0	0
2	II b				1			1	0
3	III a	1						1	0
4	III b		1	1	2			1	3
5	IV a				3			0	3
6	IV b							0	0
	Jumlah	1	1	2	5			3	6

Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Lutim 2024

Tabel 1 3 Distribusi Pegawai menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Dokter Ahli Pertama			3	8					3	8
2	Dokter Ahli Muda			5	11					5	11
3	Dokter Ahli Madya		1	5	7					5	8
4	Dokter Gigi Ahli Pertama			2	6					2	6
5	Dokter Gigi Ahli Muda			1	9					1	9
6	Dokter Gigi Ahli Madya		1		9					0	10
7	Apoteker Ahli Pertama			2	7					2	7
8	Apoteker Ahli Muda		1	2	8					2	9
9	Apoteker Ahli Madya				9					0	9
10	Asisten Apoteker Terampil				1	6	21			6	22
11	Asisten Apoteker Mahir						1			0	1
12	Asisten Apoteker Penyelia			2	6	2	6			4	12
13	Bidan Terampil				1		76			0	77
14	Bidan Mahir				23		24			0	47
15	Bidan Penyelia				7		19			0	26
16	Bidan Ahli Pertama		1		27		3			0	31
17	Bidan Ahli Muda		3		98		2			0	103
18	Bidan Ahli Madya		4		35					0	39
19	Perawat Terampil			1		22	75			23	75
20	Perawat Mahir			2	3	2	3			4	6
21	Perawat Penyelia			2	8	8	14	1		11	22
22	Perawat Ahli Pertama			6	32					6	32
23	Perawat Ahli Muda	1	1	18	91					19	92
24	Perawat Ahli Madya		2	11	47					11	49
25	Nutrisionis Terampil						3			0	3
26	Nutrisionis Penyelia						1			0	1
27	Nutrisionis Ahli Pertama		2		5					0	7
28	Nutrisionis Ahli Muda	1			4					1	4
29	Nutrisionis Ahli Madya		3		18					0	21
30	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		1	4	15					4	16
31	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda			1	5					1	5
32	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	1			7					1	7
33	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil						5			0	5
34	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir						1			0	1
35	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1		1	10					2	10
36	Tenaga Sanitasi				8					0	8

No	Jabatan Fungsional	S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Lingkungan Ahli Muda										
37	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	1	1	1	8					2	9
38	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		0	2	10					2	10
37	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda			2	1					2	1
38	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1	2	4	9					5	11
39	Administrator Kesehatan Ahli Pertama			2	18					2	18
40	Administrator Kesehatan Ahli Muda		1	2	3					2	4
41	Administrator Kesehatan Ahli Madya		2		8					0	10
42	Terapis Gigi dan Mulut Terampil				3	1	6			1	9
43	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia				3		6			0	9
44	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda				3					0	3
45	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Mahir				1		2			0	3
46	Perekam Medis Terampil					1	7			1	7
47	Perekam Medis Penyelia						9			0	9
48	Perekam Medis Mahir						1			0	1
49	Perencana Ahli Pertama				1					0	1
50	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama				1					0	1
51	Arsiparis Ahli Pertama		1	1	1					1	2
52	Teknisi Elektromedis Penyelia					1	1			1	1
53	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil					1	15			1	15
54	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia					2	6			2	6
	Jumlah	6	27	82	595	46	307	1	0	135	929

Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Lutim 2024

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur memiliki sarana pendukung pelayanan sebagai berikut:

- UPTD Puskesmas : 18 Unit
- PSC 119 : 1 Unit

- Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) : 5 Unit
- Prasarana yang mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di bawah ini:

Tabel 1 4 Kelengkapan Sarana Prasarana Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	UPTD Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Burau	82.76	40.74	51.53	66.06
2	Wotu	100	62.96	59.91	80.26
3	Tomoni	100	72.22	66.33	83.75
4	Tomoni Timur	100	53.7	92.89	92.53
5	Angkona	100	42.59	36.69	68.94
6	Malili	100	68.52	89.19	92.53
7	Lampia	94.83	68.52	60.45	78.44
8	Mahalona	81.03	51.85	49.01	65.31
9	Bantilang	100	53.7	27.22	66.26
10	Wawondula	98.28	50	74.69	84.01
11	Timampu	97.78	51.85	54.13	75.73
12	Nuha	93.1	72.22	86.81	88.5
13	Wasuponda	100	40.74	63.54	79.49
14	Mangkutana	100	62.96	60.44	80.47
15	Kalaena	100	59.26	62.23	80.82
16	Lakawali	68.89	37.04	52.02	58.95
17	Parumpanai	100	42.59	27.26	65.16
18	Bone Pute	100	31.48	36.34	67.69

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Lutim 2024

F. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, antara lain sebagai berikut:

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi
2. Masih Adanya Kasus Gizi Buruk dan Kurang pada Balita
3. Masih Adanya Balita Stunting
4. Masih Adanya Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Masih belum meratanya sumber daya kesehatan

G. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur, DAK (Fisik dan Nonfisik), DAU (Dana Alokasi Umum), DBH Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, dan Insentif Fiskal. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,650,705,090,- sehingga total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 252,616,779,720,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, program pendukung maupun program penunjang kegiatan. Secara lebih rinci anggaran berdasarkan sumber anggaran terdapat pada tabel 1.5 dan ringkasan anggaran berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan pada tabel 1.6 dibawah ini:

Tabel 1 5 Anggaran Berdasarkan Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran
1	APBD	Rp. 184,957,130,130
2	DAK Fisik	Rp. 6,247,250,000
3	DAK Non Fisik	Rp. 4,475,193,000
4	DAU E-Market	Rp. 21,468,900,000
5	DAU Tambahan (duk. Pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK)	Rp. 19,604,173,200
6	DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp. 179,816,700
7	Pajak Rokok	Rp. 11,535,501,600
8	Insentif Fiskal	Rp. 4,148,815,090
	TOTAL	Rp. 252,616,779,720

Sumber: DPA Dinkes Kab. Lutim 2024

Tabel 1 6 Ringkasan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	124,087,947,776	131,846,039,539
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181,074,250	171,228,110
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,749,500	51,605,880
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,798,250	6,317,710

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,400,000	3,363,020
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,126,500	109,941,500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117,067,211,844	124,356,014,067
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116,893,475,244	124,164,197,467
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	173,736,600	191,816,600
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43,995,000	72,995,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43,995,000	72,995,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9,240,000	9,240,000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,240,000	9,240,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	433,136,100	439,516,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	183,426,100	189,806,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	249,710,000	249,710,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516,009,510	628,954,290
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,452,600	9,452,600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,500,000	13,500,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,327,310	16,327,310
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,500,000	19,140,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,200,000	10,200,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,863,600	22,868,600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,166,000	537,465,780
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,573,611,000	1,936,131,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	51,200,000	51,200,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,224,000,000	1,224,000,000
	Pengadaan Mebel	36,181,000	36,181,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215,730,000	578,250,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,500,000	46,500,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,661,270,072	3,612,561,072
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,670,000	9,509,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,200,072	156,652,072
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,470,400,000	3,446,400,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602,400,000	619,400,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	162,700,000	159,700,000

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,700,000	39,700,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,000,000	420,000,000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	106,218,244,854	114,376,988,181
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37,213,517,100	39,200,647,187
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	19,176,000,000	20,202,772,917
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	350,000,000	320,294,600
	Pengembangan Puskesmas	2,269,135,000	2,847,806,425
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,096,180,000	6,102,780,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	300,000,000	289,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,653,345,000	1,600,423,645
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,885,982,000	2,209,363,000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	150,000,000	250,000,000
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	5,062,076,600	5,133,408,350
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	270,798,500	244,798,250
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,921,447,754	75,067,110,994
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	446,821,000	1,198,611,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5,480,784,000	5,434,674,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	897,570,000	869,820,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	187,959,500	2,370,103,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	64,730,000	58,520,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	249,330,000	106,524,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76,978,000	58,138,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38,730,199	152,930,199
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	223,006,850	404,783,770
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	53,926,650	53,926,650

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	488,441,900	520,001,510
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	236,565,000	246,733,250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	98,691,670	66,538,930
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	378,730,435	358,654,435
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,960,000	40,960,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	765,035,000	1,031,310,000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	231,425,000	480,625,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	41,660,500	41,660,500
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	333,406,000	333,926,000
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	74,200,000	74,200,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	683,495,000	663,005,000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56,689,759,800	59,408,938,200
	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	193,258,000	193,258,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	291,588,500	279,298,500
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	189,088,500	183,324,800
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	219,996,250	201,235,750
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	235,310,000	235,410,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	45,000,000	45,070,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45,000,000	45,070,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	38,280,000	64,160,000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	38,280,000	64,160,000
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5,692,838,000	5,515,838,000
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55,730,500	55,730,500
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	55,730,500	55,730,500
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	5,191,600,000	5,127,710,000

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
	Kabupaten/Kota		
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,070,000,000	4,893,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	121,600,000	234,710,000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445,507,500	332,397,500
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445,507,500	332,397,500
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	502,431,000	502,431,000
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107,350,000	107,350,000
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107,350,000	107,350,000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144,856,000	144,856,000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144,856,000	144,856,000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	250,225,000	250,225,000
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	250,225,000	250,225,000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	464,613,000	375,483,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464,613,000	375,483,000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	464,613,000	375,483,000
	Jumlah	236,966,074,630	252,616,779,720

Sumber: DPA Dinkes Kab. Lutim 2024

H. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, isu-isu strategis, keuangan, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan umum atas capaian kinerja, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. Perencanaan Kinerja

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Renstra Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi kepala daerah dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam **tabel 2.1** dibawah ini:

Tabel 2 1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender
	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha
	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat
Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan	

Sumber: RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mendukung pencapaian Tujuan Daerah yaitu mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Angka Kemiskinan, dan pencapaian Sasaran Daerah yaitu meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

a. Tujuan

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator : Angka Harapan Hidup

Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP

b. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2 2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat. (S1)	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	108,74	107,91	105,01	103,71	92,64	92.64
		Angka kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,16	8,11	7,93	7,75	7,39	7.21
		Prevalensi Stunting	%	6,19	6,08	5,80	5,60	5,40	5.20
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	80,45	82,76	84,75	85,68	87,78	90.01

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.(S8)	Nilai LAKIP	Nilai	BB	BB	A	A	A	BB

Sumber: Renstra Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Tabel 2 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya
Misi	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
Sasaran	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah
Indikator Kinerja Utama	Angka Kematian Ibu (AKI)
	Angka Kematian Bayi (AKB)
	Prevalensi Stunting
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan

Sumber: Renstra Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

3. Strategi, Program dan Kegiatan

Berdasarkan Sasaran Strategis, Tujuan, dan Sasaran, yang telah dirumuskan maka, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur pada **tabel 2.4** berikut:

Tabel 2 4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sumber: DPA Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

B. Rencana Kerja Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, ada pada **tabel 2.5** berikut ini,

Tabel 2 5 Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	103,71
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,75
	Prevalensi Stunting	%	5,60
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	85,68
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	81,50

Sumber: Renstra Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Pada anggaran perubahan, indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume dan anggaran naik sebesar Rp. 15,650,705,090,- atau sebesar 6,20% dari total anggaran.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024, ada pada **tabel 2.6** berikut:

Tabel 2 6 Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Indikator
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 100.000
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	(Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 1.000
	Prevalensi Stunting	%	(Jumlah balita pendek dan sangat pendek) dibagi (Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U) dikali 100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	(Jumlah indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit) dibagi (Target tahunan kabupaten) dikali 100

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Indikator
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP

Sumber: Renstra Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran pokok sebesar Rp. 236,966,074,630,- dengan rincian sumber Belanja Operasi sebesar Rp. 203.593.821.630,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 33.372.253.000,-. Sementara itu, untuk anggaran perubahan APBD 2024 anggaran belanja menjadi Rp. 252,616,779,720, mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,650,705,090,- atau sebesar 6,20%. Secara lebih rinci pada **tabel 2.7** berikut:

Tabel 2 7 Anggaran Belanja Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Naik/ Turun (%)
Belanja Operasional	203.593.821.630	217.621.856.133	
Belanja Modal	33.372.253.000	34.994.923.587	
Total	236,966,074,630	252,616,779,720	6,20
Tahun 2023	204.850.772.050,-	224.079.180.557,-	8,58

Sumber: DPA Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Kemudian, pada tahun 2024 juga anggaran mengalami 2 (dua) kali pergeseran, pergeseran pertama dilakukan untuk menyesuaikan revisi DAK Non-Fisik, pergeseran kedua untuk menyesuaikan kesalahan penganggaran sesuai hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sementara itu, target belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada **tabel 2.8** berikut ini:

Tabel 2 8 Target Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	124,087,947,776	131,846,039,539
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181,074,250	171,228,110
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,749,500	51,605,880
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,798,250	6,317,710
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,400,000	3,363,020
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,126,500	109,941,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117,067,211,844	124,356,014,067
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116,893,475,244	124,164,197,467
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	173,736,600	191,816,600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43,995,000	72,995,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43,995,000	72,995,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9,240,000	9,240,000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,240,000	9,240,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	433,136,100	439,516,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	183,426,100	189,806,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	249,710,000	249,710,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	516,009,510	628,954,290
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,452,600	9,452,600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,500,000	13,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,327,310	16,327,310
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,500,000	19,140,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,200,000	10,200,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,863,600	22,868,600

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,166,000	537,465,780
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,573,611,000	1,936,131,000
Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	51,200,000	51,200,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,224,000,000	1,224,000,000
Pengadaan Mebel	36,181,000	36,181,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215,730,000	578,250,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,500,000	46,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,661,270,072	3,612,561,072
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,670,000	9,509,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,200,072	156,652,072
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,470,400,000	3,446,400,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602,400,000	619,400,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162,700,000	159,700,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,700,000	39,700,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,000,000	420,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	106,218,244,854	114,376,988,181
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	37,213,517,100	39,200,647,187
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	19,176,000,000	20,202,772,917
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	350,000,000	320,294,600
Pengembangan Puskesmas	2,269,135,000	2,847,806,425
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,096,180,000	6,102,780,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	300,000,000	289,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,653,345,000	1,600,423,645
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,885,982,000	2,209,363,000
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	150,000,000	250,000,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	5,062,076,600	5,133,408,350
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	270,798,500	244,798,250

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,921,447,754	75,067,110,994
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	446,821,000	1,198,611,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5,480,784,000	5,434,674,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	897,570,000	869,820,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	187,959,500	2,370,103,500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	64,730,000	58,520,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	249,330,000	106,524,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76,978,000	58,138,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38,730,199	152,930,199
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	223,006,850	404,783,770
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	53,926,650	53,926,650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	488,441,900	520,001,510
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	236,565,000	246,733,250
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	98,691,670	66,538,930
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	378,730,435	358,654,435
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,960,000	40,960,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	765,035,000	1,031,310,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	231,425,000	480,625,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	41,660,500	41,660,500
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	333,406,000	333,926,000
Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	74,200,000	74,200,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	683,495,000	663,005,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56,689,759,800	59,408,938,200
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	193,258,000	193,258,000
Operasional Pelayanan Puskesmas	291,588,500	279,298,500
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	189,088,500	183,324,800
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	219,996,250	201,235,750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	235,310,000	235,410,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	45,000,000	45,070,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45,000,000	45,070,000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	38,280,000	64,160,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	38,280,000	64,160,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5,692,838,000	5,515,838,000
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55,730,500	55,730,500
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	55,730,500	55,730,500
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5,191,600,000	5,127,710,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,070,000,000	4,893,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121,600,000	234,710,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445,507,500	332,397,500
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	445,507,500	332,397,500
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	502,431,000	502,431,000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107,350,000	107,350,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	107,350,000	107,350,000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144,856,000	144,856,000
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	144,856,000	144,856,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	250,225,000	250,225,000
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	250,225,000	250,225,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	464,613,000	375,483,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464,613,000	375,483,000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	464,613,000	375,483,000
TOTAL	236,966,074,630	252,616,779,720

Sumber:DPA DInkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Sementara itu, untuk alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis terdapat pada **tabel 2.9** berikut ini:

Tabel 2 9 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program	Anggaran	Anggaran (%)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	114,376,988,181	45.28
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,515,838,000	2.18
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	502,431,000	0.20
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	375,483,000	0.15
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	131,846,039,539	52.19
	TOTAL		252,616,779,720,-	100

Sumber:DInkes Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Alokasi sasaran strategis digunakan untuk membiayai 5 program yang ada di Dinas Kesehatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 45,28%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 2,18%, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar 0,20%, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 0,15% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 52,19%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya pada **tabel 3.2** berikut:

Tabel 3.2
Tabel 3 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	103,71	141,21	73,44	Sedang
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,75	14,12	54,88	Rendah
		Prevalensi Stunting	%	5,60	4,99	112,25	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	85,68	84,67	98,82	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,50	0	0	
			*2023	81,01	81,10	100,11	Sangat Baik

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Keterangan: Nilai SAKIP pada tahun 2024 belum ada, karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, jadi untuk sementara menggunakan nilai SAKIP tahun 2023 yang diberikan tanda bintang *

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 indikator. Pada tahun 2024 terdapat 5 indikator kinerja yang diukur capaiannya dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya seperti dalam **tabel 3.3** berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	97,43%	100%	94,01%	94,01%	SB
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	82,41%	82,41%	100%	SB
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	100%	71,01%	71,01%	100%	SB
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100%	100%	100%	100%	SB
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	96,00%	96,00%	100%	SB

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada **tabel 3.3** dapat dilihat bahwa, dari lima program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, terdapat satu program yang belum mencapai target, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase capaian SPM bidang Kesehatan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran dan Indikator Dinas Kesehatan

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat diukur dengan 4 indikator. Indikator tersebut yaitu: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator pada **tabel 3.4** berikut:

Tabel 3 4 Rumusan dan Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 1.000
		Prevalensi Stunting	(Jumlah balita pendek dan sangat pendek) dibagi (Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U) dikali 100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	(Jumlah indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit) dibagi (Target tahunan kabupaten) dikali 100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan pada tahun 2024 dapat digambarkan pada **tabel 3.5** berikut ini:

Tabel 3 5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	147,09	133,31	122,22	103,71	141,21	73,44
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,56	10,28	13,44	7,75	14,12	54,88
3	Prevalensi Stunting	3,7	3,2	3,63	5,6	4,99	112,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	84,57	85,02	87,36	85,68	84,67	98,82
5	Nilai LAKIP	74,14	80,65	81,10	81,50	0	0

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2024 pada **tabel 3.6** berikut:

Tabel 3 6 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2024	Keterangan
Angka Kematian Ibu (AKI)	183 per 100.000 KH	141,21	Tercapai
Angka Kematian Bayi (AKB)	16 per 1.000 KH	14,12	Tercapai
Prevalensi Stunting	14%	4,99	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	100	84,67	Belum Tercapai
Nilai LAKIP	100	81,10	Belum Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan **tabel 3.6**, dapat dilihat bahwa dalam perbandingan hasil kinerja sasaran tahun 2024 dengan standar nasional, maka ada 3 indikator yang telah tercapai yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Prevalensi Stunting. Sementara itu, masih ada 2 indikator lainnya yang belum tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan kesehatan dan Nilai LAKIP.

2. Analisa Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator sasaran Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator sasaran strategis dari 5 indikator kinerja sasaran yang dinilai, 3 indikator kinerja berpredikat Sangat Baik, 1 indikator kinerja berpredikat Sedang dan 1 indikator kinerja berpredikat Rendah.

Analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator seperti berikut:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

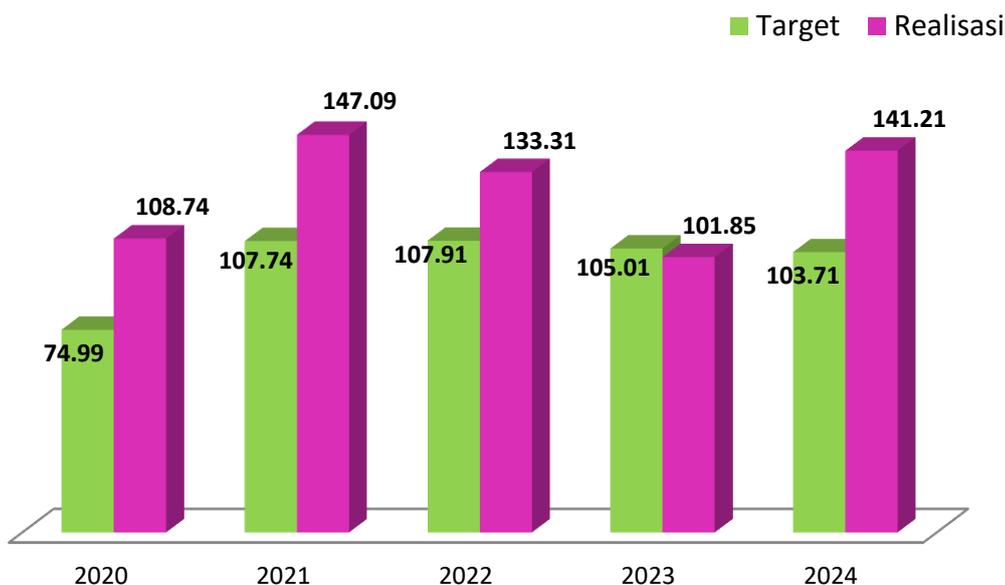
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator sensitif yang menunjukkan kualitas kesehatan suatu Negara, karena AKI menggambarkan hasil interaksi dari berbagai aspek, baik aspek klinis (kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan), aspek sistem layanan kesehatan (sistem jaminan kesehatan, sistem informasi rujukan) maupun aspek-aspek non kesehatan (budaya, pendidikan, akses menuju tempat layanan kesehatan).

Kematian ibu merupakan kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental.

Jumlah kasus kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator utama yang berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan ketika masa nifas. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi kasus kematian ibu secara langsung antara lain status gizi dan anemia pada kehamilan. Selain itu tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga dan pola kerja rumah tangga.

Pada **grafik 3.1** berikut, target dan realisasi indikator kinerja sasaran Angka Kematian Ibu di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir,

Grafik 3 1 Grafik Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber: Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Grafik 3.1 diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan. Tahun 2023 mengalami penurunan di angka 101,85 per KH, tetapi kembali naik di tahun 2024 di angka 141,21. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak enam orang, 2021 sebanyak delapan orang, 2022 sebanyak tujuh orang, 2023 sebanyak lima orang dan tahun 2024 sebanyak

enam orang. Berdasarkan penyebab kematian ibu, maka penyebab enam kasus tersebut terdiri dari, kasus perdarahan sebanyak tiga orang, kasus infeksi sebanyak satu orang, dan dua kasus lainnya karena adanya penyakit penyerta pada ibu hamil. Berdasarkan wilayah kerja maka enam kasus kematian ibu tersebut berada diwilayah kerja Puskesmas tomoni sebanyak dua kasus, diwilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur sebanyak satu kasus, diwilayah kerja Puskesmas Malili sebanyak satu kasus, diwilayah kerja Puskesmas Wasuponda sebanyak satu kasus, dan diwilayah kerja Puskesmas Mahalona juga sebanyak satu kasus.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra dapat dilihat pada **tabel 3.7** berikut ini. Realisasi kinerja Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2026, maka belum mencapai target.

Tabel 3 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	92,64	141,21	Belum Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Beberapa faktor pendorong dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

- Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas
- Adanya pelaporan rutin kader ke puskesmas dalam upaya pencegahan risiko kejadian kematian ibu.

- Adanya komunikasi efektif antar Puskesmas yang telah mendeteksi adanya risiko kehamilan

Selain itu, upaya-upaya pencegahan ataupun strategi untuk mencegah kematian ibu juga tetap terus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas petugas dengan melaksanakan OJT (*On the Job training*) Petugas FKTP ke Rumah Sakit.
- Pendampingan Tim Ahli (Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan) dalam pelayanan kesehatan anak, pelayanan kegawat daruratan neonatal dan tata laksana para rujukan.
- Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) untuk Ibu hamil yang akan bersalin dan domisilinya jauh dari fasilitas kesehatan. Tempat Tunggu kelahiran tahun 2024 terdapat lima rumah yang masing-masing berada pada wilayah kerja Puskesmas Parumpantai, wilayah kerja Puskesmas Bantilang, wilayah kerja Puskesmas Angkona, wilayah kerja Puskesmas Mangkutan dan satu TTK Kabupaten terletak di dekat Rumah Sakit I La Galigo Kecamatan Wotu.



Meskipun telah melakukan upaya penurunan, pastinya akan masih ada hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja, yaitu:

- Adanya penyakit penyerta pada ibu hamil/ ibu bersalin, misalnya penyakit jantung, hipertensi, sehingga memperparah keadaan ibu hamil/ ibu bersalin tersebut;
- Faktor usia pada ibu hamil/ ibu bersalin (terlalu muda atau terlalu tua) yang sangat berpengaruh pada kejadian komplikasi ibu hamil/ ibu bersalin ini juga menjadi salah satu pentingnya menghindari 4T yaitu Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak anak dan Terlalu rapat jarak kelahiran.

Upaya yang diajukan diatas adalah menjawab permasalahan yang masih muncul yaitu masih diperlukan penguatan deteksi dini risiko kehamilan agar semua petugas terampil mengenali tanda-tanda resiko kehamilan, melakukan Assessment, Diagnosa, Tatalaksana dan Rujukan dengan tepat dan masih diperlukan peningkatan peran/ kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak melalui gerakan sayang ibu, gerakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.

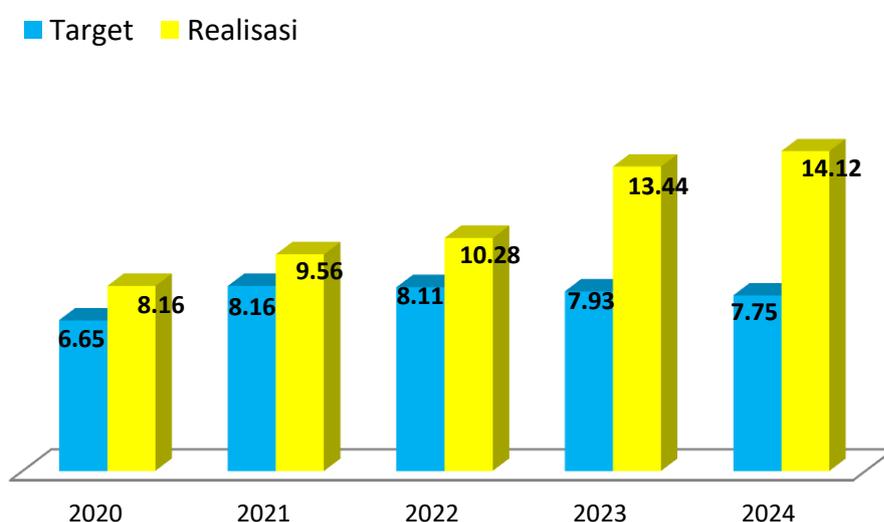
b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Singkatnya bahwa angka kematian bayi mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Berikut **grafik 3.2** target dan realisasi indikator kinerja sasaran Angka Kematian Bayi di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir,

Grafik 3 2 Grafik Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber: Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan **grafik 3.2** dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir ini, angka kematian bayi mengalami kenaikan terus-menerus, kenaikan yang paling signifikan terjadi di tahun 2022 ke tahun 2023 dari 10,28 per 1.000 KH menjadi 13,44 per 1.000 KH atau naik sebesar 3,16. Sementara dari segi jumlah kasus kematian bayi, maka jumlah kematian bayi terbanyak terjadi pada tahun 2023 sebanyak 66 kasus, kemudian di tahun 2024 sebanyak 60 kasus.

Dari segi kelompok usia, kematian bayi terbanyak pada kelompok usia 0-28 hari dan pada kelompok usia 29 hari – 11 bulan sebanyak 13 kasus. Berdasarkan penyebab kematian maka

penyebab kematian terbanyak disebabkan karena sindrom gawat nafas (*respiratory distress syndrome*) sebanyak 15 kasus. Secara lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 3.8** berikut ini,

Tabel 3 8 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab Kematian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kematian Bayi
1	Sindrom gawat nafas (RDN)	15
2	Berat bayi lahir rendah (BBLR)	11
3	Asfiksia	4
4	Kelainan bawaan	6
5	Sepsis	3
6	Pneumonia	3
7	Penyakit jantung bawaan	2
8	Penyakit penyerta lainnya	16
	Total	60

Sumber: Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan wilayah kerja puskesmas jumlah kematian bayi terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Malili dan Puskesmas Tomoni sebanyak 6 kasus, menyusul wilayah kerja Puskesmas Burau, Puskesmas Mangkutana, Puskesmas Angkona dan Puskesmas Lakawali sebanyak 5 kasus, dan wilayah kerja yang tidak ada kasus kematian berada di Puskesmas Parumpanai dan Puskesmas Wawondula.

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra dapat dilihat pada **tabel 3.9** dibawah ini. Perbandingan realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra, belum mencapai target.

Tabel 3 9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	7,21	14,12	Belum Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Beberapa masalah yang didapatkan terkait kematian bayi antara lain:

- Kondisi ibu waktu hamil mengalami komplikasi serta kurang gizi;
- Kondisi saat lahir dengan berat badan rendah (BBLR);
- Adanya kelainan bawaan yang menyebabkan kematian bayi;
- Adanya sistem pencatatan pelaporan dengan menggunakan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification).
- Faktor sosial budaya yang belum sadar akan pentingnya pelayanan kesehatan bagi bayi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya dilakukan antara lain:

- Peningkatkan akses dan mutu layanan di fasilitas kesehatan
- Perbaikan system jejaring rujukan pelayanan kesehatan bayi
- Adanya MoU dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk pemeriksaan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) bayi baru lahir
- Peningkatan kapasitas petugas dengan melaksanakan *On The Job Training* petugas FKTP ke Rumah Sakit.
- Pendampingan Tim Ahli (Dokter Ahli Anak) dalam pelayanan kesehatan anak, pelayanan kegawat darurat neonatal dan tata laksana rujukan.
- Pemantauan kesehatan bayi baru lahir (kunjungan neonatal) oleh bidan desa
- Pengadaan sarana/ peralatan untuk penanganan kegawat darurat neonatal mobile untuk Puskesmas yang belum mendapatkan.
- Perbaikan lingkungan dengan peningkatan akses air bersih dan sanitasi
- Pencegahan pernikahan dini pada remaja.

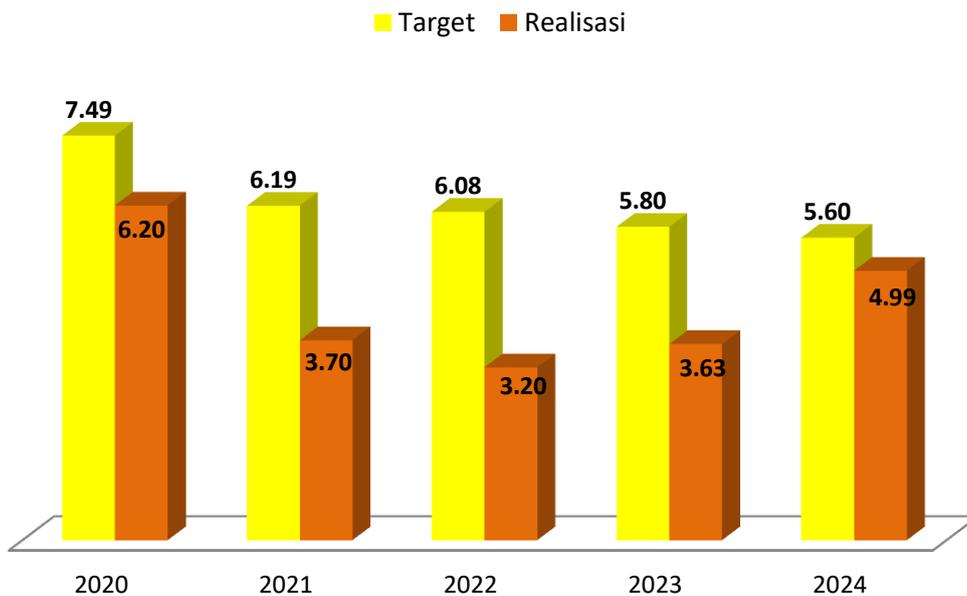
c. Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penyebab stunting terbagi atas penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Sementara, penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (pemberian makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (akses air bersih, air minum, dan sarana sanitasi).

Pada **grafik 3.3** berikut, target dan realisasi indikator kinerja sasaran Prevalensi Stunting selama lima tahun terakhir,

Grafik 3.3 Grafik Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber: Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Grafik 3.3 memperlihatkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir masih naik turun, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 6,20% hingga ke tahun 2022 sebesar 3,20% dan mulai terjadi kenaikan hingga tahun 2024 sebesar 4,99%.

Berdasarkan wilayah kerja puskesmas jumlah balita stunting dapat dilihat pada **tabel 3.10** berikut,

Tabel 3 10 Jumlah Balita Stunting Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas

No	Puskesmas	Jumlah Balita yang Ditimbang	Jumlah Balita yang Diukur Tinggi Badan	Jumlah Balita Pendek	% Balita Pendek
	Burau	1220	1220	115	9.43
	Bone Pute	975	1062	58	5.46
	Wotu	1554	1709	147	8.60
	Tomoni	1574	1653	56	3.39
	Tomoni Timur	931	931	55	5.91
	Mangkutana	1180	1180	115	9.75
	Kalaena	680	752	68	9.04
	Angkona	1593	1593	80	5.02
	Malili	1761	1758	46	2.62
	Lampia	521	568	21	3.70
	Lakawali	891	891	25	2.81
	Wasuponda	1041	1135	30	2.64
	Parumpanai	332	361	37	10.25
	Nuha	1094	1195	38	3.18
	Wawondula	1557	1555	38	2.44
	Timampu	702	746	18	2.41
	Mahalona	496	496	45	9.07
	Bantilang	381	423	22	5.20
	Total	18.483	20.986	1.014	5,27

Sumber: Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada **tabel 3.10** diatas dapat dilihat bahwa jumlah balita pendek paling banyak berada diwilayah kerja Puskesmas Burau dan Puskesmas Mangkutana sebanyak 115 balita, tetapi jika berdasarkan persentase balita pendek maka persentase balita pendek tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Parumpanai sebesar 10,25%.

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra dapat dilihat pada **tabel 3.11** dibawah ini. Perbandingan realisasi Prevalensi

Stunting tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra, belum mencapai target.

Tabel 3 11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	5,20	4,99	Capai Target

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Beberapa masalah terkait kejadian balita stunting antara lain :

- Remaja putri yang menderita anemi
- Jumlah ibu KEK masih tinggi
- Masih ada Ibu hamil yang tidak periksa HB
- Jumlah bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi
- Masih ada bayi di bawah 6 bulan yang tidak diberi Asi Eksklusif
- Masih kurangnya balita yang mengalami kenaikan BB pada saat penimbangan
- Balita yang mengalami berat badan tidak naik belum mendapatkan PMT lokal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan antara lain :

- Pemeriksaan kadar Hb pada remaja putri kelas 7 dan 10 di sekolah serta remaja putri yang putus sekolah di posyandu remaja
- Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri di sekolah dan posyandu remaja
- Pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin
- Edukasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi dan stunting pada calon pengantin

- Melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara lengkap di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya
 - Edukasi dan konseling ibu hamil terkait Asi Eksklusif dan MP-ASI optimal
 - Melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan
 - Pemberian PMT lokal pada balita tidak naik berat badan (T), balita berat badan kurang (underweigh) dan balita gizi kurang (wasting).
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Unit pelayanan publik yang dimaksud pada indikator ini yaitu Rumah Sakit I Laga Ligo dan 18 UPT Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan pada unit pelayanan publik tersebut, maka nilai indeks kepuasan

masyarakat urusan kesehatan yang didapatkan yaitu sebesar 84,67% dan masuk dalam kategori B (Baik). Berikut nilai indeks kepuasan masyarakat urusan kesehatan pada **tabel 3.12** berikut,

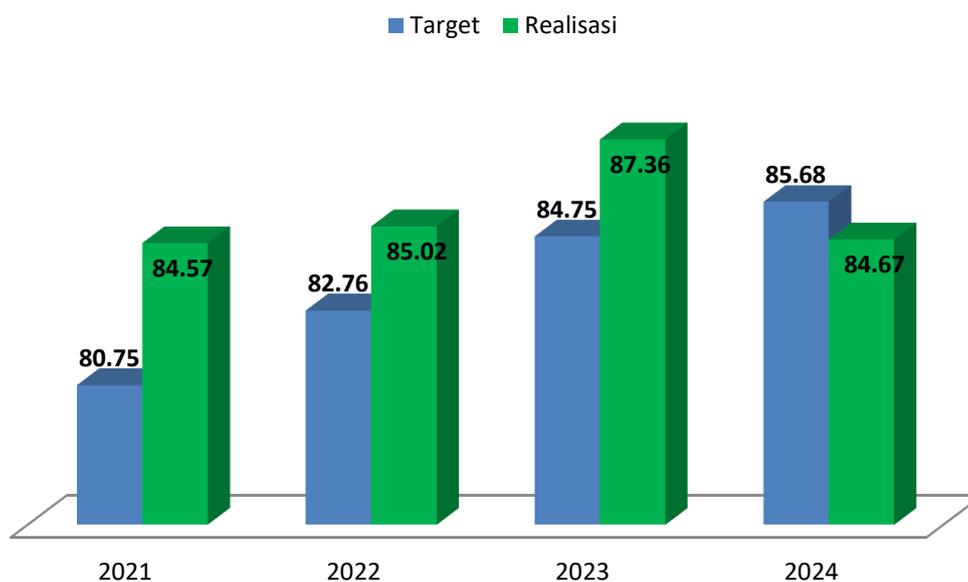
**Tabel 3 12 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No	Unit Pelayanan	Nilai (%)	Kategori
1	Burau	84.24	Baik
2	Bonepute	96.64	Sangat Baik
3	Wotu	88,14	Sangat Baik
4	Tomoni	85.71	Baik
5	Tomoni Timur	83.71	Baik
6	Mangkutana	89.19	Sangat Baik
7	Kalaena	94.9	Sangat Baik
8	Angkona	95.02	Sangat Baik
9	Lakawali	93.50	Sangat Baik
10	Parumpanai	83.35	Baik
11	Malili	89.92	Sangat Baik
12	Lampia	90.1	Sangat Baik
13	Wasuponda	86.05	Baik
14	Nuha	90.36	Sangat Baik
15	Wawondula	83.35	Baik
16	Timampu	88.5	Sangat Baik
17	Mahalona	81.03	Baik
18	Bantilang	96.64	Sangat Baik
19	Rumah Sakit I Lagaligo	96.5	Sangat Baik
	Total	84,67	BAIK

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Selanjutnya pada **grafik 3.4** berikut, target dan realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan selama lima tahun terakhir,

Grafik 3 4 Grafik Target dan Realisasi IKM Urusan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra pada **tabel 3.13** berikut ini. Dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra, belum mencapai target.

Tabel 3 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	90,01	84,67	Belum Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam urusan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur, beberapa upaya telah dan masih sementara dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu:

- Adanya program UHC (Universal Health Coverage) bagi seluruh lapisan masyarakat

- Sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata di semua wilayah Kabupaten Luwu Timur
- Peningkatan infrastruktur sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Meskipun telah melakukan upaya penurunan, pastinya akan masih ada hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja, yaitu:

- Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa sarana layanan kesehatan
- Masih kurangnya prasarana kesehatan pendukung di beberapa wilayah.
- Penggunaan sumber dana kesehatan yang terbatas.

Dan untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa alternatif solusi yang dilakukan yaitu:

- Penerimaan tenaga kesehatan melalui jalur CPNS ataupun jalur P3K
- Peningkatan prasarana dan perbaikan sarana kesehatan yang ada.
- Pengelolaan pengaduan melalui pelayanan publik, serta perubahan sistem, mekanisme dan prosedur.

e. Nilai LAKIP

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi

atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

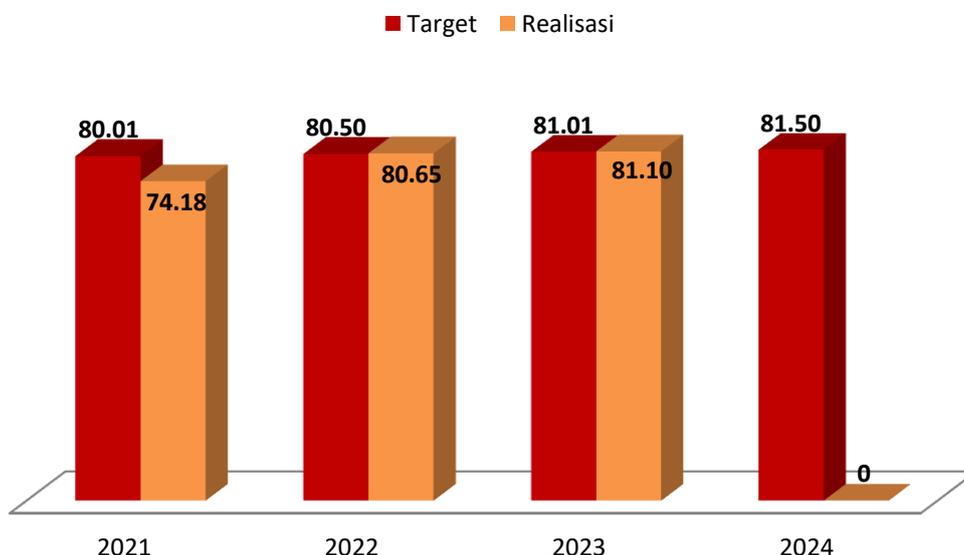
Tabel 3 14 Nilai Angka, Kategori dan Interpretasi AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan,
2	A	> 80 - 90	Memuaskan (memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik (akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal)
4	B	> 60 - 70	Baik (akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan)
5	CC	> 50 - 60	Cukup/ Memadai (akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar)
6	C	> 30 - 50	Kurang (sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar)
7	D	0 - 30	Sangat Kurang (sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar)

Sumber: Permenpan RB No. 88 Tahun 2021

Pada **grafik 3.5** berikut, target dan realisasi indikator kinerja sasaran Nilai LAKIP selama lima tahun terakhir,

Grafik 3 5 Grafik Target dan Realisasi Nilai LAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra pada **tabel 3.15** berikut ini. Dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra, belum mencapai target.

Tabel 3 15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	82,50	81,10	Belum Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Lainnya

1) Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai

jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*;

yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif.

Berikut ini **tabel 3.16** untuk melihat rumusan dan formulasi indikator standar pelayanan minimal dan **tabel 3.17** untuk realisasi dan capaian kinerja standar pelayanan minimal,

Tabel 3 16 Rumusan dan Formulasi Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wil.kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wil.kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wil.kerja kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wil.kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yg mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi

Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator
		baru lahir di wil. kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wil.kerja kab/ kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wil.kerja kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yg ada di wil.kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kab/ kota yg mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kab/ kota dalam waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wil.kerja kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yg ada di wil.kerja kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wil.kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yg berada di dalam wil.kerja berdasarkan angka prevalensi kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)	Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di wil.kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun yg berada di dalam wil.kerja berdasarkan angka prevalensi kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wil.kerja kab/ kota yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wil.kerja kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yg dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan orang yg terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kab/ kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama dikali 100

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

**Tabel 3 17 Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	96,88%	Belum Tercapai
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	99,84%	Belum Tercapai
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,12%	Belum Tercapai
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	93,86%	Belum Tercapai
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	Tercapai
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	63,35%	Belum Tercapai
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	97,36%	Belum Tercapai
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	78,67%	Belum Tercapai
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)	100%	100%	Tercapai
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	100%	Tercapai
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100%	Tercapai

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada tabel 3.17 dapat dilihat bahwa dari 12 indikator standar pelayanan minimal, terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran. Semakin hemat/ sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi merupakan ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya secara minimum dalam suatu proses guna pencapaian hasil yang optimal.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada **tabel 3.18** berikut,

**Tabel 3 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Program	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94,01%	98,18%	1,82
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	90,17%	9,83
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	66,23%	33,27
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	31,38%	68,62
	Jumlah	98,50%	71,49%	27,01
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	96,97%	95,49%	1,48
	Jumlah	96,97%	95,49%	1,48

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Ket: Capaian kinerja: Realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran: Realisasi keuangan program yang mendukung indikator.

Tingkat efisiensi: Capaian kinerja – Penyerapan anggaran

Pada **tabel 3.18** diatas dapat dilihat bahwa kedua sasaran strategis adalah efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran. Tingkat efisien penggunaan sumber daya pada sasaran pertama sebesar 27,01%, dimana persentase tersebut lebih besar dari pada tingkat efisien pada sasaran kedua yang sebesar 1,48%.

5. Program inovasi penunjang kinerja

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang menunjang kinerja antara lain,

a. Puskesmas Burau

Dengan inovasi:

- “Japrika” (Jemput Antar Pasien Rawat Inap Kami Ada), pelaksana inovasi Iramaya Azis, S.Kep, Ns.
- ”Sapama” (Sayang Opa Oma), pelaksana inovasi Rosiani, S.Kep, Ns.

- “Permen Dacita” (Persalinan Aman Dapat Cindera Mata), pelaksana inovasi Bd. Hasniar, S.Keb.
 - “Saking Cerdas Jebol Desa” (Saatnya Screening Cancer Payudara dan Serviks Jemput Bola di Desa) pelaksana inovasi, Bd. Desy, S.Keb.
- b. Puskesmas Wotu
- Dengan inovasi “Sapijat Baita” (Senam Pijat Bayi Balita), dan sebagai pelaksana inovasi Bd. Ita Tome, S.Tr, Keb.
- c. Puskesmas Mangkutana
- Dengan inovasi:
- “Teko Panas” (Teh Kelor Kaya Manfaat Untuk Ibu Nifas), pelaksana inovasi Muryani, A.Md.Keb.
 - “Berdekatanki Mama di Lesehan” (Bersama Kudekati Ki’ Masyarakat Mangkutana Ingatkanki Kontrol dan Hidup Lebih Sehat Lahir Batin), pelaksana inovasi Nuridah, S.Kep, Ns dan Fitriani, S.Kep.Ns.
 - “Gercep Mas” (Gerakan Cepat Tanggap pada Masyarakat Mangkutana), pelaksana inovasi Esti Kandi Pratiwi, SKM, M.Kes.
 - “Si Buresa Koma” (Stiker Bumil Resti Atasi Komplikasi Maternal), pelaksana inovasi Deli Gustin, SKM, M.Kes dan Lia Herdyati, S.Tr.Keb.
 - “Laktasi” (Layanan Antar Kartu Identitas Bayi), pelaksana inovasi Lia Herdyati, S.Tr.Keb.
 - “Layanan Surat (Suara Kesehatan) Keliling, pelaksana Reski Marselino Palagiang, SKM
- d. Puskesmas Tomoni Timur
- Dengan inovasi “Jamu Cinta Kasih” (Ajak Masyarakat Untuk Cuci Luka Dengan Tepat Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies), dan sebagai pelaksana inovasi Muliati Kendek, SKM.

- e. Puskesmas Kalaena
Dengan inovasi:
 - “Sertimun” (Sertifikat Imunisasi), pelaksana inovasi Nurdin, S.Kep,Ns
 - “Jedar” (Jemput Dahak Di Rumah), pelaksana inovasi Andi Eko Puwanto, A.Md, Kep
 - “Lyontin” (Layanan Calon Pengantin), pelaksana inovasi Yuliana Solo, A.Md, Keb
- f. Puskesmas Angkona
Dengan inovasi “Jendela Kita” (Jemput Antar Dahak Dengan Kualitas Terjaga), sebagai pelaksana inovasi Usman, S.Kep, Ns
- g. Puskesmas Lakawali
Dengan inovasi “Kompas Medikasi” (Kolaborasi Masyarakat Terhadap Penanganan Dispepsia dan Hipertensi Melalui Media Edukasi), dan sebagai pelaksana inovasi dr. Kelik Ismi Harjanto.
- h. Puskesmas Wasuponda
Dengan inovasi “Mata Buntu” (Jemput Rawat Inap Ibu Hamil Terpantau), sebagai pelaksana inovasi Leny.De'e, S.Tr, Keb.
- i. Puskesmas Nuha
Dengan inovasi “Cika Ceria” (Cuci Luka Cegah Rabies), pelaksana inovasi Nancy Randa S.Kep, Ns.
- j. Puskesmas Wawondula
Dengan inovasi “Mari Berakting” (Remaja Putri Bergerak Tolak Stunting), dan sebagai pelaksana inovasi Hasnik Rumbang, S.Tr, Keb.
- k. Puskesmas Timampu
Dengan inovasi “Si Dini Berutang” (Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Bersama Ketua RT), dan sebagai pelaksana inovasi Haerati Burhanuddin, S.Tr, Keb.
- l. Puskesmas Bantilang
Dengan inovasi “Pangkilang Candu” (Pantau Keliling Ibu Hamil Wilayah PKM Bantilang Dengan Cangkir Kehidupan), sebagai pelaksana inovasi Bd. Artini Djuhadi, S.Tr.Keb.

6. Penghargaan

Berikut beberapa penghargaan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan,

- Gubernur Sulawesi Selatan menganugerahkan Tanda Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur atas prestasinya sebagai **KABUPATEN TERBAIK DALAM PELAPORAN SURVEILANS VEKTOR DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU TAHUN 2024**
- Gubernur Sulawesi Selatan menganugerahkan Tanda Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur atas prestasinya sebagai **TERBAIK KETIGA** dalam **PENGELOLAAN ASPAK PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**.
- Gubernur Sulawesi Selatan memberikan Piagam Penghargaan kepada **BUPATI LUWU TIMUR** atas **KOMITMEN NYATA YANG TELAH DIBERIKAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI SULAWESI SELATAN**
- Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur atas dukungan dan partisipasinya dalam Program Kesehatan Gigi dan Mulut Bagi Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur.



C. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2024 sebesar Rp. 243,623,672,775,- atau sebesar 96,44% dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 252,616,779,720,-. Realisasi anggaran untuk program/ kegiatan utama (pendukung sasaran strategis) sebesar Rp. 117,718,859,914,- dari total anggaran sebesar Rp. 120,770,740,181,- dengan persentase realisasi 97,47%. Realisasi ini meningkat dibanding persentase realisasi tahun 2023 yang sebesar 94,14%. Sementara itu, realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp. 125,904,812,861,- dari total anggaran sebesar Rp. 131,846,039,539,- dengan persentase realisasi 95,49%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, maka penyerapan anggaran terbesar ada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112,294,838,654,- dari total anggaran sebesar Rp. 114,376,988,181,-, dengan persentase realisasi 98,18%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp. 117,833,860,- dari total anggaran sebesar Rp. 375,483,000,- dengan persentase realisasi 31,38%.

Tabel 3 19 Rekap Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	114,376,988,181	112,294,838,654	98.18
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39,200,647,187	38,796,656,686	98.97
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	20,202,772,917	20,008,165,227	99.04
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	320,294,600	320,294,070	100.00
Pengembangan Puskesmas	2,847,806,425	2,831,848,236.40	99.44
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,102,780,000	6,101,255,004	99.98
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	289,000,000	287,611,000	99.52
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,600,423,645	1,600,319,993	99.99
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	2,209,363,000	2,182,757,300	98.80

Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	250,000,000	118,577,000	47.43
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	5,133,408,350	5,109,590,980.40	99.54
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	244,798,250	236,237,875	96.50
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,067,110,994	73,408,092,968	97.79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,198,611,000	1,085,936,220	90.60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5,434,674,000	5,404,018,720	99.44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	869,820,000	853,653,199	98.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2,370,103,500	2,356,322,710	99.42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58,520,000	38,474,828	65.75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	106,524,000	88,762,380	83.33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	58,138,000	57,005,440	98.05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	152,930,199	126,326,700	82.60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	404,783,770	392,779,503	97.03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	53,926,650	52,633,970	97.60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	520,001,510	440,531,940	84.72
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	246,733,250	242,017,572	98.09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	66,538,930	34,484,266	51.83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	358,654,435	323,573,435	90.22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	40,960,000	39,320,000	96.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,031,310,000	1,022,488,516	99.14
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	480,625,000	459,212,900	95.54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	41,660,500	39,429,997	94.65
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	333,926,000	297,788,489	89.18
Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	74,200,000	70,510,000	95.03

Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	663,005,000	505,089,160	76.18
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	59,408,938,200	58,523,824,169	98.51
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	193,258,000	190,605,040	98.63
Operasional Pelayanan Puskesmas	279,298,500	267,558,922	95.80
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	183,324,800	97,560,646	53.22
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	201,235,750	182,005,010	90.44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	235,410,000	216,179,236	91.83
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	45,070,000	34,600,500	76.77
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45,070,000	34,600,500	76.77
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	64,160,000	55,488,500	86.48
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	64,160,000	55,488,500	86.48
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5,515,838,000	4,973,436,820	90.17
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55,730,500	17,918,000	32.15
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	55,730,500	17,918,000	32.15
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5,127,710,000	4,799,411,990	93.60
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,893,000,000	4,588,536,990	93.78
Pembinaan dn Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	234,710,000	210,875,000	89.84
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332,397,500	156,106,830	46.96
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332,397,500	156,106,830	46.96
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	502,431,000	332,750,580	66.23
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107,350,000	79,184,080	73.76
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107,350,000	79,184,080	73.76

Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144,856,000	116,666,000	80.54
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144,856,000	116,666,000	80.54
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	250,225,000	136,900,500	54.71
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	250,225,000	136,900,500	54.71
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	375,483,000	117,833,860	31.38
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375,483,000	117,833,860	31.38
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	375,483,000	117,833,860	31.38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	131,846,039,539	125,904,812,861	95.49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171,228,110	146,359,034	85.48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51,605,880	51,353,580	99.51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,317,710	6,211,890	98.33
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,363,020	3,199,020	95.12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109,941,500	85,594,544	77.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124,356,014,067	118,529,459,551	95.31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124,164,197,467	118,338,558,965	95.31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	191,816,600	190,900,586	99.52
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72,995,000	70,089,500	96.02
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72,995,000	70,089,500	96.02
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	9,240,000	9,240,000	100.00

Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Perangkat Daerah			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,240,000	9,240,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	439,516,000	416,707,000	94.81
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	189,806,000	179,162,200	94.39
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	249,710,000	237,544,800	95.13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	628,954,290	594,844,580	94.58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,452,600	9,452,600	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,500,000	13,400,000	99.26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,327,310	16,321,440	99.96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,140,000	18,686,400	97.63
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,200,000	10,200,000	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	22,868,600	19,547,450	85.48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537,465,780	507,236,690	94.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,936,131,000	1,929,559,406	99.66
Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	51,200,000	49,338,656	96.36
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,224,000,000	1,223,964,300	100.00
Pengadaan Mebel	36,181,000	35,508,000	98.14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	578,250,000	574,736,450	99.39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,500,000	46,012,000	98.95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,612,561,072	3,593,413,292	99.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,509,000	8,284,200	87.12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156,652,072	138,729,092	88.56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,446,400,000	3,446,400,000	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619,400,000	615,140,498	99.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159,700,000	159,039,868	99.59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,700,000	39,630,000	99.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420,000,000	416,470,630	99.16
TOTAL	252,616,779,720	243,623,672,775	96.44

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 3 20 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2023			Anggaran 2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	103,71	141,21	73,44	120,770,740,181	117,718,859,914	97.47
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,75	14,12	54,88			
	Prevalensi Stunting	%	5,60	4,99	112,25			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Nilai	85,68	84,67	98,82			
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	81,01	81,10	100,11	131,846,039,539	125,904,812,861	95.49

Sumber: Dinkes Kab. Luwu Timur Tahun 2024

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah (Lakip) pada tahun 2023 di tuangkan dalam matris tindak lanjut berikut:

**Tabel 3 21 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP
Dinas Kesehatan Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/ Progres Penyelesaian
1	Menyusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala	Telah disusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala	Pada Januari 2025
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu setelah diformalkan	Telah dipublikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Pada Januari 2025
3	Menjelaskan definisi operasional	Telah diberikan penjelasan definisi operasional pada indikator kinerja	Telah diberikan penjelasan operasional pada indikator kinerja Eselon II di Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4	Melengkapi perjanjian kinerja dengan CSF serta menjelaskan kondisi yang diinginkan	Telah dilengkapi perjanjian kinerja dengan CSF dan penjelasan kondisi yang diinginkan	Telah dilengkapi di Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/ Progres Penyelesaian
5	Membuat Perkada tentang TPP, mekanisme pembayaran TPP	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.
6	Membuat pedoman pola mutasi/ rotasi (terdapat penjelasan mutasi/ rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerja) dari BKPSDM	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.
7	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Informasi tentang realisasi AKI, AKB, Prevalensi Stunting yang menjadi realisasi pada tahun 2024, akan menjadi target awal pada tahun 2025
8	Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai memahami dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja	Telah mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja	Informasi terkait capaian kinerja telah disampaikan pada rapat internal

BAB IV PENUTUP



Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran dinas kesehatan terdapat empat (4) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024 ada tiga (3) indikator sasaran yang telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik** dan dua (2) indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, satu (1) indikator dengan kategori **Sedang** dan satu (1) indikator kategori **Rendah**. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kendala.
2. Dari analisis indikator program, ada satu (1) program yang belum mencapai target yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan, dan empat (4) indikator program lainnya telah memenuhi target.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 96,44% dengan predikat **Sangat Baik**.

B. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah/ Strategi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan yang dapat dirumuskan dalam Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (*Community Involment dan Empowerment*) dan pelibatan multistakeholder.
2. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas.
3. Penguatan perencanaan obat, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial education penggunaan obat rasional.
4. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit Tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya
5. Peningkatkan cakupan imunisasi melalui kegiatan diluar gedung untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI)
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan kerja di dalam gedung maupun di luar gedung.
7. Meningkatkan peran serta lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

LAMPIRAN

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Pohon Kinerja

Lampiran 3. Cascading

Lampiran 4. Cross Cutting

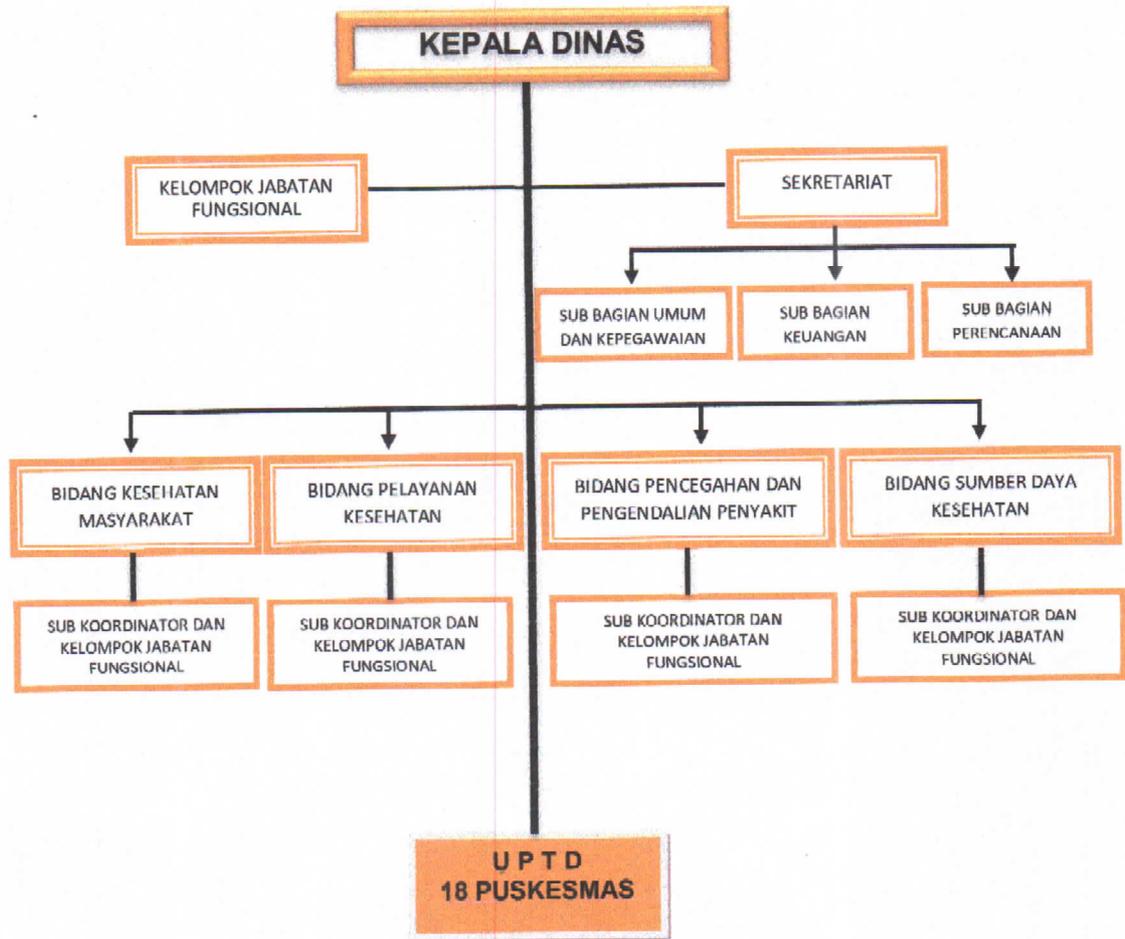
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 6. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023

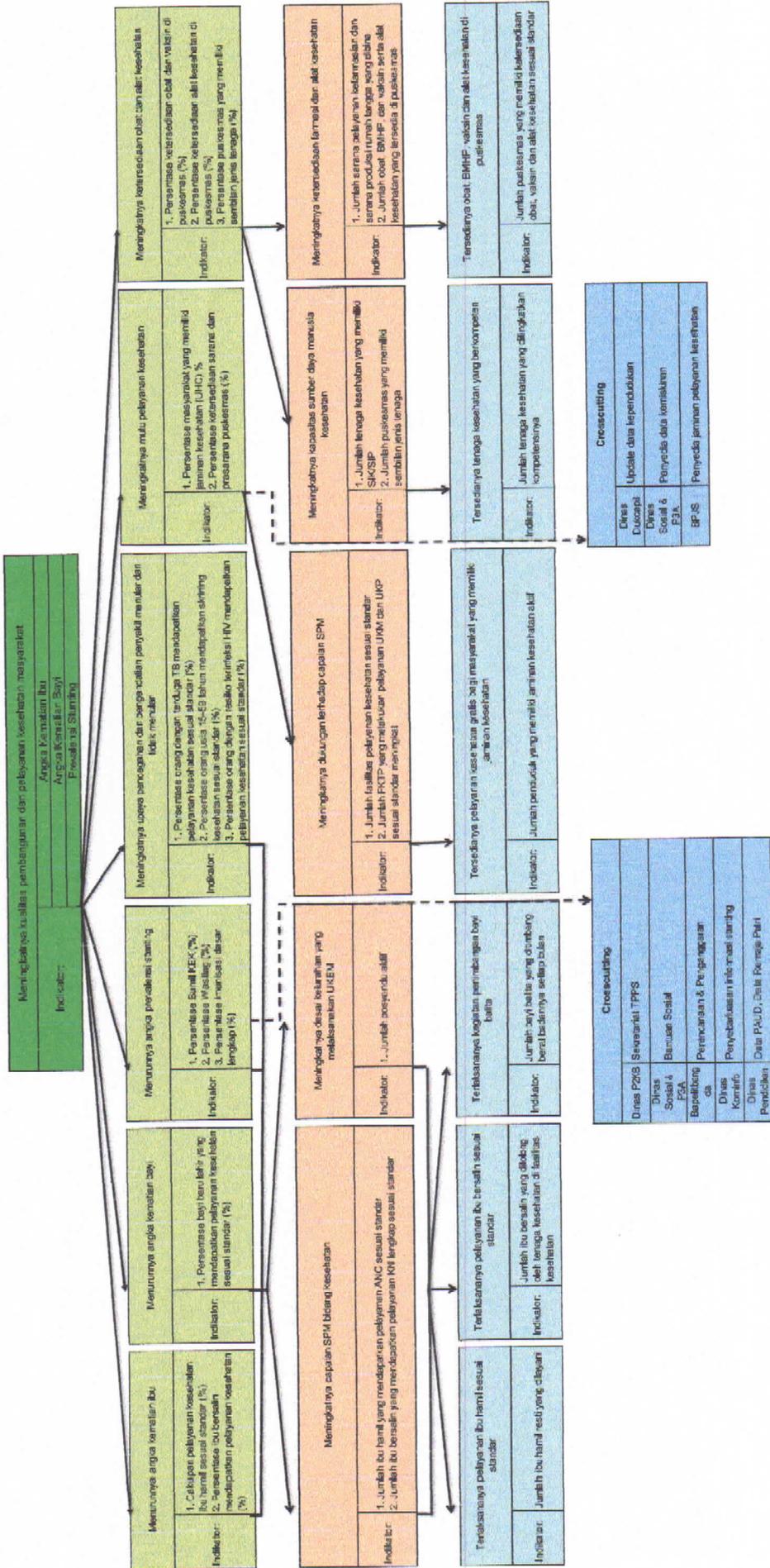
Lampiran 7. Penghargaan yang Pernah Diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2024**



POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMUWU TIMUR

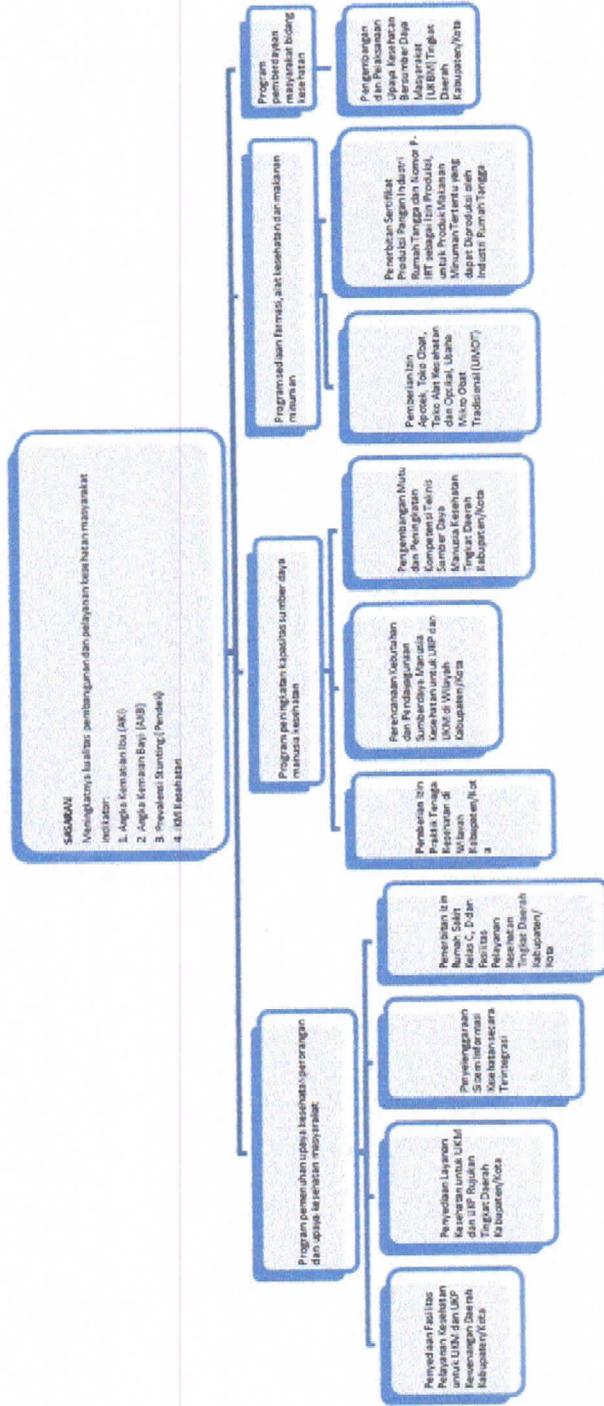


Crosscutting	
Dinas P2CS	Sekretariat PPS
Dinas Sosial & P3A	Bumih Sosial
Bepalibang	Perencanaan & Penganggaran
Dinas Kominfo	Pengembangan Informatika
Dinas Pendidikan	Data P3A, Data Pemaja Putri

Crosscutting	
Dinas Kesehatan	Update data kependudukan
Dinas Sosial & P3A	Penyedia data kependudukan
BPJS	Penyedia jaminan pelayanan kesehatan

Lampiran 3. Cascading CASCADING DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2024

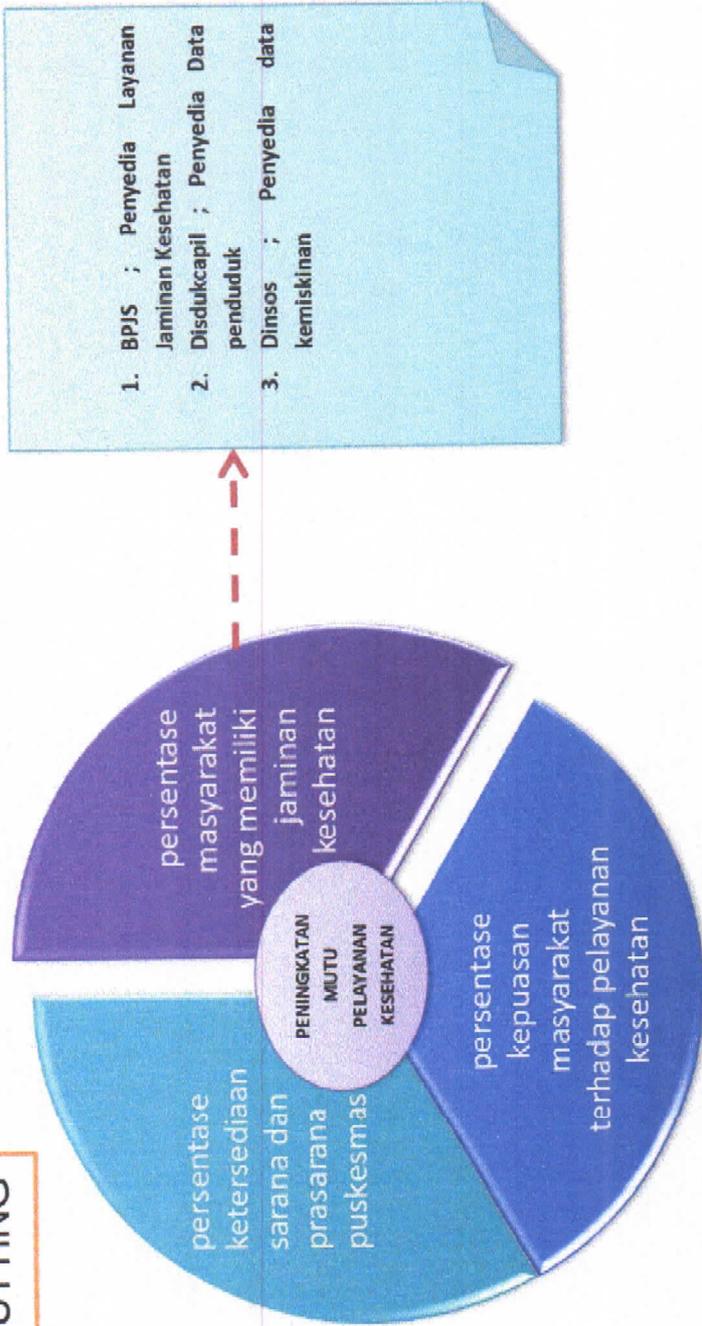
CASCADING PROGRAM KEGIATAN

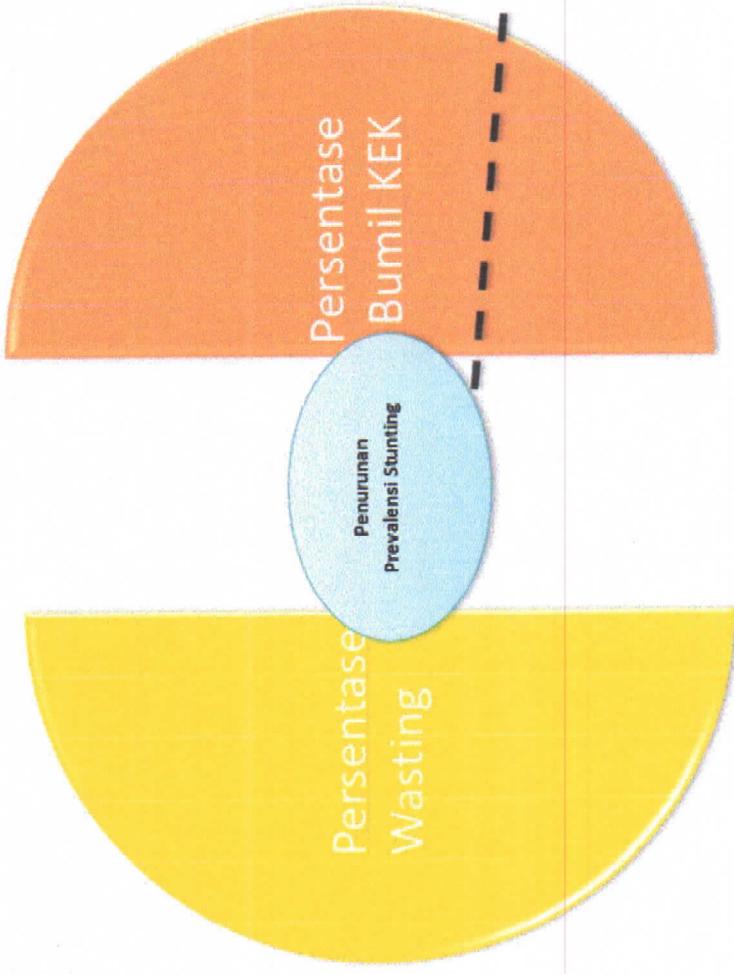


Lampiran 4. Cross Cutting

CROSS CUTTING DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2023

CROSS CUTTING





1. Bapelitbangda ; Perencanaan dan Penganggaran
2. DP2KB : Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting
3. Kominfo: Penyebar luasan informasi Stunting
4. Dinsos : bantuan sosial
5. Dinas Pendidikan : Data PAud

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ADNAN D. KASIM

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

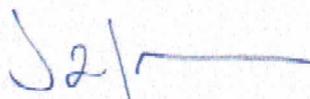
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

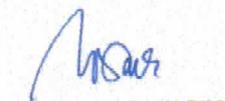
Mallit, Januari 2024

Pihak Pertama

f PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd


dr. ADNAN D. KASIM

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	103,71 (per 100 000 KH)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,75 (per 1000 KH)
	Prevalensi Stunting	5,60 (%)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	85,68 (Nilai)
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	94,01 (%)

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 106.218.244.854,-
2.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 5.692.838.000,-
3.	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 502.431.000,-
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 464.613.000,-
5.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 124.087.947.776,-
	TOTAL	Rp. 236.966.074.630,-

Malili, Januari 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,

(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

(dr. ADNAN D. KASIM)

Keterangan

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian ibu adalah kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 100.000
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	(Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 1.000
3	Prevalensi Stunting	Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD	(Jumlah balita pendek dan sangat pendek) dibagi (Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U) dikali 100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran	(Jumlah indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit) dibagi (Target

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
		secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.	tahunan kabupaten) dikali 100%
5	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		(Realisasi semua program) dibagi (Jumlah seluruh target program tahun berjalan) dikali 100%



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. ADNAN D. KASIM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

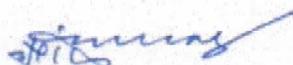
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

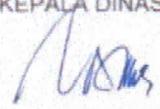
Pihak Kedua

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR


Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN

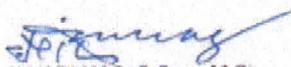

dr. ADNAN D. KASIM

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
TABEL KINERJA TAHUN 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	103,71 (per 100.000 KH)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7,75 (per 1000 KH)
		Prevalensi Stunting	5,60 (%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	85,68 (Nilai)
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,50

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 114.376.988.181,-
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.515.838.000,-
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 502.431.000,-
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 375.483.000,-
5	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 131.846.039.539,-
	TOTAL	Rp. 252.616.779.720,-

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Mallili, 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. ADNAN D. KASIM

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran 1

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berdasar makna sasaran maka Dinas Kesehatan menetapkan Sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana pembangunan kesehatan itu sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini yaitu menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan. Negara dengan warganya yang sehat mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, merangsang inovasi, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Prevalensi Stunting
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian ibu adalah kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental</p>	<p>Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator suatu Negara karena AKI dan AKB menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan utamanya pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<p>(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 100.000</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p>
2	<p>Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu.</p>	<p>Angka Kematian Bayi merupakan yang sangat penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi</p>	<p>(Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 1.000</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p>

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
3	<p>Prevalensi Stunting</p> <p>Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) memiliki <i>Z-score</i> kurang dari -2SD</p>	<p>Masalah stunting menjadi penting untuk diselesaikan karena sangat berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan hingga kematian bayi dan anak</p>	<p>(Jumlah balita pendek dan sangat pendek) dibagi (Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U) dikali 100</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p>
4	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari aparat penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.</p>	<p>Indeks kepuasan masyarakat urusan kesehatan merupakan satu cara untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima</p>	<p>(Jumlah indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit) dibagi (Target tahunan kabupaten) dikali 100</p>	<p>Hasil survey kepuasan masyarakat pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur serta Rumah Sakit Daerah Kabupaten Luwu Timur</p>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka Kematian Ibu (AKI)	103,71 (per 100.000 KH)	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 108,74 per 100.000 KH. Secara Nasional, Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000KH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS 2015), walaupun kondisi ini masih jauh dari target RPJMN, yaitu 183 per 100.000 KH pada tahun 2024, maupun dari target SDGs, yaitu 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.
Angka Kematian Bayi (AKB)	7,75 (per 1000 KH)	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,16 per 1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017).
Prevalensi Stunting	5,60 (%)	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,19%. Prevalensi stunting pada balita dari 37,2% (Riskesdas 2013) turun menjadi 30,8% (Riskesdas 2018) dan 27,7% (SSGBI 2019). Prevalensi wasting menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 10,2% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Begitu pula untuk kasus gemuk, prevalensi gemuk pada balita terjadi penurunan dari 11,8% (Riskesdas 2013) menjadi 8% (Riskesdas 2018).
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	85,68 (Nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kesehatan merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026. Berdasarkan PermenPAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2021 sebesar 85,68 (Nilai). Angka tersebut termasuk dalam kategori 76,61 – 88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik).

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Dinas Kesehatan yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	<p>rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</p>		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	81,50	<p>Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2021 sebesar 80,01 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).</p>

Lampiran 6. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/ Progres Penyelesaian
1	Menyusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala	Telah disusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala	Pada Januari 2025
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu setelah diformalkan	Telah dipublikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Pada Januari 2025
3	Menjelaskan definisi operasional	Telah diberikan penjelasan definisi operasional pada indikator kinerja	Telah diberikan penjelasan operasional pada indikator kinerja Eselon II di Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4	Melengkapi perjanjian kinerja dengan CSF serta menjelaskan kondisi yang diinginkan	Telah dilengkapi perjanjian kinerja dengan CSF dan penjelasan kondisi yang diinginkan	Telah dilengkapi di Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025
5	Membuat Perkada tentang TPP, mekanisme pembayaran TPP	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.
6	Membuat pedoman pola mutasi/ rotasi (terdapat penjelasan mutasi/ rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerja) dari BKPSDM	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.	Telah di koordinasikan kepada pihak terkait.
7	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Informasi tentang realisasi AKI, AKB, Prevalensi Stunting yang menjadi realisasi pada tahun 2024, akan menjadi target awal pada tahun 2025
8	Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai memahami dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja	Telah mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja	Informasi terkait capaian kinerja telah disampaikan pada rapat internal

Lampiran 7. Penghargaan yang Pernah Diterima

Daftar Penghargaan Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu Pemberian
1	Kabupaten Terbaik dalam Pelaporan Surveilans Vektor dan Pelaksanaan Pengendalian Vektor Terpadu	Gubernur Sulawesi Selatan	2024
2	Terbaik Ketiga dalam Pengelolaan Aspak Puskesmas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan	2024
3	Bupati Luwu Timur atas Komitmen Nyata yang Telah Diberikan Dalam Upaya Penanggulangan HIV/ AIDS di Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan	2024
4	Kabupaten yang melakukan Pengawasan Post Market Pangan olahan Terbaik Periode Tahun 2023	Badan POM RI	2024
5	Piagam Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Utama dalam Pencapaian UHC Word	Menteri Koordinasi Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	2024
6	Penghargaan Kabupaten Kota Sehat Swastisaba Wiwerda	Kementerian Kesehatan RI	2023
7	Penghargaan Terbaik 2 STBM Award Kategori Madya	Kementerian Kesehatan RI	2023
8	Penghargaan Kinerja Pengelola STBM Peringkat 3 Tingkat Prov. Sulawesi Selatan	Dinkes Prov. Sulawesi Selatan	2023
9	Penghargaan Terbaik 2 Kategori Pengendalian Pandemi Covid - 19 PPKM AWARD 2023	Kementerian Kesehatan RI	2023

Sub Bagian Perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
Jl. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah
Malili, Luwu Timur
Sulawesi Selatan

